



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RENCANA KERJA **PERANGKAT DAERAH** **TAHUN 2025**

**DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABEL.....iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I. PENDAHULUAN.....Bab. I | 1

1.1. Latar BelakangBab. I | 1

1.2. Landasan Hukum.....Bab. I | 4

1.3. Maksud dan TujuanBab. I | 6

1.4. Sistematika PenulisanBab. I | 7

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.Bab. II | 1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat DaerahBab. II | 1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahBab. II | 15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat DaerahBab. II | 26

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPDBab. II | 31

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatBab. II | 40

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab. III | 1

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan NasionalBab. III | 1

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten WonogiriBab. III | 10

3.3. Program dan KegiatanBab. III | 10

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....Bab. IV | 1

BAB V. PENUTUPBab. V | 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten WonogiriBab. II | 11

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.....Bab. II | 23

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Bab. II | 34

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Wonogiri Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten WonogiriBab. II | 40

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....Bab. III | 13

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....Bab. IV | 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Diagram Penyusunan Renja Perangkat DaerahBab. I | 3

Gambar IV.1 Sasaran Pembangunan Tahun 2025Bab. III | 1

Gambar IV.2 Prioritas Nasional Tahun 2025Bab. III | 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (tahun). dalam penyusunan dokumen renja PD, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bappeda dan Litbang serta dengan pemangku kepentingan.

Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilalui dalam proses penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan

Persiapan penyusunan Renja PD meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan

- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala BAPPEDA dan LITBANG untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah dan harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan LITBANG. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan tentang RKPD.
6. Penetapan.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Sehingga Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 menjadi pedoman Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dalam menyusun RKA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025.

[illegible]

RENJA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Wonogiri 2025

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum disusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187). Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 106 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri;

17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.
19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dimaksudkan untuk memberikan pedoman, gambaran, dan arah pembangunan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian di Kabupaten Wonogiri dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu untuk tahun 2025. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi lebih terarah, efektif, efisien dan terukur dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025;

- b) Menyiapkan rencana program Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tahun 2025;
- c) Menyusun indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai, guna mencapai sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri; dan
- d) Menetapkan pendanaan indikatif untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dokumen ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Wonogiri. Pada bagian ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dan capaian Renstra tahun lalu ini mengusung Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selama tahun

2023 beserta indikator, target dan capaian di dalamnya dan dihasilkan sebagai berikut:

PROGRAM NON URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah. Target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja, dengan indikator Persentase Perusahaan yang telah menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK). Target sebesar 5,7% dengan capaian kinerja sebesar 5,7%.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan indikator Persentase pencari kerja yang ditempatkan. Target sebesar 56,36% dengan capaian kinerja sebesar 78,87%.
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikator Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi. Target 1,18% dengan capaian kinerja sebesar 1,25%.
4. Program Hubungan Industrial, dengan indikator Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Target sebesar 11% dengan capaian kinerja 16,33%.

KEGIATAN NON URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun. Target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun. Target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase tertib administrasi kepegawaian. Target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah. Target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator Persentase pemeliharaan barang milik daerah. Target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum. Target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), dengan indikator Jumlah jenis dokumen RTK yang disusun. Target sebanyak 1 dokumen dengan capaian kinerja sebanyak 1 dokumen yang tersusun (RTK Mikro).
2. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan indikator Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi. Target sebanyak 1.740 orang dengan capaian kinerja sebanyak 8.795 orang.
3. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan indikator Jumlah program pelatihan yang sudah *link and match* dengan Perusahaan. Target sebanyak 10 program dengan capaian kinerja sebanyak 13 program.
4. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, dengan indikator Persentase LPK yang memiliki perizinan. Target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 140%.
5. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan. Target sebanyak 7.250 orang dengan capaian kinerja sebanyak 7.499 orang yang ditempatkan.
6. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan indikator Jumlah lowongan kerja yang bisa dibangun *link and match*-nya. Target sebanyak 7.000 lowongan dan dengan capaian sebanyak 14.290 lowongan kerja.
7. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah pencari kerja migran yang ditempatkan. Target sebanyak 50 orang dan dengan capaian sebanyak 88 orang.

8. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase TKA yang terdata. Target sebesar 100% dan dengan capaian kinerja sebesar 100%.
9. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Perusahaan yang mempunyai sarana HI. Target sebanyak 10 perusahaan dan dengan capaian kinerja sebanyak 11 perusahaan.
10. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah perusahaan yang menindaklanjuti pembinaan ketenagakerjaan. Target sebanyak 10 perusahaan dan dengan capaian kinerja sebanyak 11 perusahaan.

SUB KEGIATAN NON URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Target sebanyak 5 dokumen dan dengan capaian kinerja sebanyak 5 dokumen.
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan indikator Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. Target sebanyak 36 orang/bulan dan dengan capaian kinerja sebanyak 39 orang/bulan.
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan indikator Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Target sebanyak 6 orang pegawai dan dengan capaian kinerja sebanyak 30 pegawai.
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, dengan indikator Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan. Target sebanyak 4 paket dan dengan capaian kinerja sebanyak 4 paket.
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. Target sebanyak 2 paket dan dengan capaian kinerja sebanyak 4 paket.
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan. Target sebanyak 20 paket dan dengan capaian kinerja sebanyak 20 paket.
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan indikator Jumlah jenis kebutuhan barang cetak dan penggandaan selama satu

- tahun. Target sebanyak 3 paket dan dengan capaian kinerja sebanyak 7 paket.
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator Jumlah perjalanan dinas keluar daerah selama satu tahun. Target sebanyak 24 laporan dalam setahun dan dengan capaian kinerja sebanyak 58 laporan.
 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat. Target 7 laporan dan dengan capaian kinerja sebanyak 7 laporan yang terpakai.
 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan. Target sebanyak 36 laporan dan dengan capaian kinerja sebanyak 36 laporan.
 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. Target sebanyak 15 laporan dan dengan capaian kinerja sebanyak 20 laporan.
 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan indikator Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Target 31 unit dan dengan capaian sebanyak 36 unit.
 13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Target sebanyak 20 unit dan dengan capaian kinerja sebanyak 20 unit yang dipelihara.
 14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan indikator Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas. Target sebanyak 1 unit dan dengan capaian kinerja 1 unit.
 15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan indikator Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Target sebanyak 10 unit dan dengan capaian kinerja sebanyak 10 unit.
 16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator Jumlah unit peralatan mesin dan lainnya yang disediakan. Di tahun 2023 tidak terdapat pengadaan.

17. Pelayanan antar Kerja, dengan indikator Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL. Target sebanyak 5.000 orang dan dengan capaian kinerja penempatan sebanyak 7.323 orang.
18. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja, dengan indikator Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan. Target sebanyak 500 orang dan dengan capaian kinerja sebanyak 728 orang yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan.
19. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, dengan indikator Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD. Target sebanyak 10 orang dan dengan capaian sebanyak 10 orang yang mendapat fasilitasi ULD.
20. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online, dengan indikator Jumlah data dan informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online. Target sebanyak 12 dokumen dan dengan capaian kinerja sebanyak 12 dokumen.
21. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, dengan indikator Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub). Target sebanyak 600 orang dan dengan capaian kinerja sebanyak 1.727 orang.
22. Job Fair/Bursa Kerja, dengan indikator Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja. Target sebanyak 750 orang dan dengan capaian kinerja sebanyak 830 orang.
23. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan indikator Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya. Target sebanyak 5 orang dan dengan capaian kinerja sebanyak 60 orang.
24. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase Tenaga Kerja Asing yang teridentifikasi. Target sebesar 100% dan dengan capaian kinerja sebesar 100% TKA yang teridentifikasi.
25. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro, dengan indikator Jumlah perusahaan yang menyusun RTK Mikro. Target sebanyak 5 perusahaan dan dengan capaian kinerja sebanyak 5 perusahaan.
26. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro, dengan indikator Jumlah perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota.

Target sebanyak 5 perusahaan dan dengan capaian kinerja sebanyak 5 perusahaan yang berhasil Menyusun RTK Mikro.

27. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, dengan indikator Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n. Target sebanyak 1.500 orang dan dengan capaian kinerja sebanyak 8.795 orang.
28. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja, dengan indikator Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n. Target sebanyak 10 lembaga dan dengan capaian kinerja sebanyak 13 lembaga.
29. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja. Target sebanyak 14 unit dan dengan capaian kinerja sebanyak 14 unit.
30. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan indikator Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina. Target sebanyak 28 lembaga dan dengan capaian kinerja sebanyak 30 lembaga.
31. Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi, dengan indikator Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi. Target sebanyak 5 perizinan dan dengan capaian kinerja sebanyak 7 perizinan.
32. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan, dengan indikator Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online. Target sebanyak 10 perusahaan dan dengan capaian kinerja sebanyak 10 perusahaan.
33. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan, dengan indikator Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan. Target sebanyak 1 dokumen dan dengan capaian kinerja sebanyak 1 dokumen di akhir tahun.
34. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan

di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah perselisihan yang dicegah. Target sebanyak 50 perkara dan dengan capaian kinerjanya sebanyak 59 perkara.

35. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan. Target sebesar 3 perkara dan dengan capaian kinerja 3 perkara terselesaikan.

36. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah LKS Tripartit yang dibina. Target sebanyak 1 lembaga dalam setahun dan dengan capaian kinerja sebanyak telah terlaksana 1 lembaga dalam setahun.

37. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, dengan indikator Terlaksananya program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja. Target sebanyak 300 orang dan dengan capaian kinerja sebanyak 1.667 orang.

Dari uraian Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selama tahun 2023, memberikan dampak positif bagi perkembangan Sasaran RPJMD 2021-2026 untuk Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian dan hal ini juga menjadi prestasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yakni dengan turunnya angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), yang semula 1,95% menjadi 1,92% (*sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2023*).

Berikut kategori pencapaian Renja sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang tercapai sesuai dengan target renja **sebesar 100%** adalah sebagai berikut :
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 2) Program Perencanaan Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program dan Kegiatan yang tercapai sesuai dengan target renja, namun **kurang dari 100%** adalah sebagai NIHIL.
3. Program dan Kegiatan yang sesuai dengan target renja, namun **lebih dari 100%** adalah sebagai berikut:
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
 - b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 - c) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
 - 3) Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pelayanan antarkerja di daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 - c) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota.

Untuk capaian sampai dengan tahun 2023, kegiatan yang telah mencapai 100% atau lebih, berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan program dan kegiatan dapat mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan upaya semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan sehingga seluruh kebutuhan pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dapat terpenuhi dengan baik;

- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini melebihi target dikarenakan tingginya antusias masyarakat/pencari kerja dalam mengikuti program-program pelatihan dan sebagai pengembangan inovasi WRP (*Work Readiness Program*) yang dikelola dengan pendanaan APBD oleh Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Super Gen-Z yang dikelola dengan pendanaan APBN oleh UPTD BLK.
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja. Program ini melebihi target dikarenakan banyak pencari kerja yang terserap dalam dunia kerja dan tersebar di berbagai sektor. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dalam rangka memberikan informasi kepada pencari kerja telah memaksimalkan penggunaan media sosial yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri seperti Live Instagram dan Twitter, mengoptimalkan penggunaan layanan aplikasi Sisnaker dan e-makaryo, serta menyelenggarakan Job Fair pada bulan Mei 2023.
- 4) Program Hubungan Industrial. Program ini mempunyai capaian 100% di kegiatan-kegiatannya yang berfokus pada penyelenggaraan penyusunan regulasi bagi perusahaan, pencegahan dan penyelesaian permasalahan di lingkungan industrial, dimana telah banyak perusahaan yang memiliki alat-alat Hubungan Industrial sebagai kelengkapan regulasi dan administrasi dalam pengembangan usaha.

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selama tahun 2023 ini juga dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Wonogiri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (s/d Triwulan I 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20 %	20 %
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah Yang Di Susun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	111 %	111 %
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.07.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (s/d Triwulan I 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	58,03 %	67,88 %	56,36 %	72,01 %	127,76 %	57,20 %	82,28 %	145,99 %
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Dan Ditempatkan	7.250 orang	8.407 orang	7.250 orang	7.499 orang	103,43 %	7.250 orang	1.542 orang	21,27 %
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Lowongan Kerja Yang Bisa Dibangun <i>Link and Match</i> Nya	9.000 lowongan	33.056 lowongan	7.000 lowongan	14.290 lowongan	550,93 %	7.000 lowongan	2.248 lowongan	32,11 %
2.07.04.2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota	Jumlah Pencari Kerja Migran yang Ditempatkan	100 orang	82 orang	50 orang	88 orang	820 %	50 orang	23 orang	46 %
	Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam satu daerah kabupaten/kota	Persentase TKA yang Terdata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a	n/a
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perusahaan Yang Telah Menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	7,1 %	5 %	5,7 %	5,7 %	100 %	6,4 %	0 %	0 %
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Jenis Dokumen RTK Yang Disusun	1 dokumen	2 dokumen	1	1	100 %	1	0 dokumen	0 %
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	1,24 %	26,38 %	1,18 %	1,25 %	105,93 %	1,21 %	0 %	0 %
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	2.400 orang	3.268 orang	1.740 orang	8.795 orang	505,46 %	2.120 orang	391 orang	18,44 %
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Program Pelatihan Yang Sudah <i>Link and Match</i> Dengan Perusahaan	10 program	10 program	10 program	13 program	130 %	10 program	0 program	0 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (s/d Triwulan I 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	100 %	100 %	100 %	140 %	140 %	100 %	0 %	0 %
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	13 %	10 %	11 %	16,33 %	148,45 %	12 %	0 %	0 %
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang Mempunyai Sarana HI	10 perusahaan	11 perusahaan	10 perusahaan	10 perusahaan	100 %	10 perusahaan	0 perusahaan	0 %
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang Menindaklanjuti Pembinaan Ketenagakerjaan	10 perusahaan	11 perusahaan	10 perusahaan	10 perusahaan	100 %	10 perusahaan	0 perusahaan	0 %
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase kontribusi sektor industri dalam PDRB	17,80 %	18,13 %	17,70 %	18,61 %	105,14 %	17,75 %	0 %	0 %
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang diberdayakan	1,5 %	3 %	1 %	17,87 %	1.787 %	1,25 %	0 %	0 %
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase peningkatan jumlah pelaku industri (unit usaha)	5 %	2,24 %	3 %	2,99 %	99,69 %	4 %	0 %	0 %
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan	Jumlah IUI yang diterbitkan	10 IUI	6 IUI	6 IUI	1.777 IUI	29.616,67 %	8 IUI	4 IUI	50 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (s/d Triwulan I 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota									
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Proporsi pelaku usaha industri yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	0,56 %	0,25 %	0,4 %	1,36 %	339,13 %	0,48 %	0 %	0 %
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Informasi Industri	14 Kecamatan	25 Kecamatan	10 Kecamatan	25 Kecamatan	250 %	12 Kecamatan	0 Kecamatan	0 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, masing-masing Perangkat Daerah telah ditetapkan indikator kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah tersebut. Sehingga dalam pengukuran kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri berpedoman pada indikator yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis tersebut. Adapun indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

Tujuan I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Indikator : *Nilai Kematangan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian*

Target : 45

Faktor pendukung keberhasilan:

Pemahaman seluruh pegawai akan pentingnya Nilai Kematangan Organisasi agar apa yang menjadi tujuan OPD dapat tercapai dengan baik. Nilai Kematangan Organisasi menunjukkan bahwa suatu organisasi publik yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan dan peran yang diberikan oleh organisasi tersebut. Kematangan Perangkat Daerah diukur berdasarkan pencapaian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tersebut pada setiap variabel dan indikator

Faktor penghambat keberhasilan:

Kurangnya pemahaman akan Nilai Kematangan Organisasi yang sering kali menyebabkan kurangnya koordinasi antar pegawai dalam mewujudkan tujuan OPD.

Perbandingan dengan tahun lalu:

Nilai Kematangan Organisasi ini pada tahun 2023 (tahun lalu) memiliki target nilai sebesar 45, namun realisasinya hanya tercapai 40 atau sebesar 88,88% dikarenakan terdapat komponen penilaian yang kurang memenuhi.

Sasaran I : Meningkatnya kinerja Disnakerin Kab. Wonogiri

Indikator : *Nilai SAKIP Disnakerin*

Target : 75,50

Faktor pendukung keberhasilan:

- a. Adanya kooperatif antar personal dalam kaitannya memberikan hasil capaian kinerja.

- b. Melakukan monitoring secara berkala atas pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi.
- c. Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan baik dari BPK RI maupun BPKP/Inspektorat Provinsi/Kabupaten.
- d. Probis (proses bisnis) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang telah berorientasi pada outcome.
- e. Perencanaan kegiatan yang telah terintegrasi.
- f. Pada masing-masing bidang perencanaan kegiatan sudah mengacu pada cascading.
- g. Adanya *reward and punishment* untuk kinerja bidang-bidang.

Faktor penghambat keberhasilan:

- Hal yang menjadi penghambat jika tidak segera merespon rekomendasi penilaian SAKIP atau tidak segera menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi penilaian SAKIP tersebut.
- Adanya penetapan target yang terlalu besar ataupun terlalu kecil.

Perbandingan dengan tahun lalu:

Dalam penilaian SAKIP 2023, terdapat komponen penilaian yang nilainya kurang memenuhi yakni Nilai Kematangan Organisasi, namun untuk nilai SAKIP di tahun 2023 mengalami kenaikan dari 71,96 (2022) menjadi 78,05 dengan kategori BB.

Indikator : *Indeks Profesionalitas ASN*

Target : 70

Faktor pendukung keberhasilan:

- a. Penilaian kinerja yang dilakukan telah berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku PNS.
- b. Penggunaan aplikasi HADIRKU untuk pelaksanaan absensi harian yang terintegrasi dengan aplikasi SiTAMPAN yaitu aplikasi perhitungan tunjangan dan potongan pelanggaran kedisiplinan.

Faktor penghambat keberhasilan:

- a. Kurangnya sikap proaktif dari staff untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan pelaksanaan tugas dan jabatan.
- b. Keterbatasan anggaran untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi

Perbandingan dengan tahun lalu:

Perolehan nilai IP ASN di tahun 2023 sebesar 71,25, sedangkan untuk penilaian IP ASN sendiri dilakukan di akhir tahun.

Indikator : *Jumlah ASN Disnakerin yang menjadi Agen Perubahan*

Target : 2 orang

Faktor pendukung keberhasilan:

- a. Dorongan dan dukungan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri kepada seluruh Bidang dan UPTD BLK untuk lebih proaktif dan terus berinovasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan dan menjadi agen perubahan.
- b. Kepala Dinas telah membentuk tim kreatif dan dari tim tersebut dilahirkan 2 inovasi yang menggerakkan lini/daya di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

Faktor penghambat keberhasilan:

Kurangnya kesadaran akan pentingnya menjadi Agen Perubahan yang memiliki dampak positif bagi perkembangan instansi.

Perbandingan dengan tahun lalu:

Di tahun 2023, dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Wonogiri No. 148 Tahun 2023 tentang Penetapan Agen Perubahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2023, telah ditetapkan sejumlah 4 (empat) orang sebagai Agen Perubahan yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kepala UPTD BLK dan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Indikator : *Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian*

Target : 1

Faktor pendukung keberhasilan:

- a. Inovasi yang telah ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri mendapat dukungan dari semua pegawai agar dengan adanya inovasi tersebut dapat mencapai efektif dan efisien dalam bekerja.
- b. Inovasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri bersifat *upgrading* yang berorientasi pada pelayanan publik dan target sasaran dinas.

Faktor penghambat keberhasilan:

Masih adanya keterbatasan anggaran untuk mengembangkan inovasi.

Perbandingan dengan tahun lalu:

Tahun 2023, Inovasi yang telah dikembangkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian telah dilaporkan terkait WIA (Wonogiri *Innovation Award*) yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Wonogiri, yakni WRP (*Work Readiness Program*) dan Super Gen-Z.

- Program WRP (*Work Readiness Program*) dimana program ini menyoar ke penyiapan calon tenaga kerja dengan turun ke SMK-SMK agar mereka siap lebih dini.
- Super Gen-Z yakni Inovasi yang dikembangkan oleh UPTD BLK terkait dengan metode pembelajaran saat penyampaian materi pelatihan bagi peserta pelatihan di UPTD BLK Kabupaten Wonogiri.

Selain itu Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga menyelenggarakan Live Instagram (IG) secara berkala dengan berbagai narasumber dan topik-topik yang berbeda untuk berbagi informasi kepada pencari kerja sekaligus menambah wawasan seputar dunia kerja.

Indikator : *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*

Target : 91

Faktor pendukung keberhasilan:

- a. Penggunaan media online google form dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat penggunaan media online google form dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat.
- b. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telah melakukan mutasi pelayanan dari pelayanan offline ke online sehingga memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan dan memperoleh layanan dinas.

Faktor penghambat keberhasilan:

Hanya sebagian staff yang memahami pentingnya pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat.

Perbandingan dengan tahun lalu:

IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 memiliki capaian sebesar 91,52 dari target sebesar 91. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik kepada masyarakat telah dinilai cukup baik dan untuk dipertahankan. Di tahun 2023 ini, akan ditingkatkan kembali untuk penilaian IKM ini.

Tujuan II : *Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja*

Indikator : Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Target : 96,15%

Faktor pendukung keberhasilan:

- a. Adanya kesempatan kerja yang tersedia
- b. Tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan
- c. Usia calon tenaga kerja dan jumlah angkatan kerja yang tersedia
- d. Besarnya permintaan total masyarakat
- e. Jumlah investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta
- f. Kebijakan pajak dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan
- g. Kerjasama dengan negara lain, untuk kesempatan kerja di luar negeri

Faktor penghambat keberhasilan:

- a. Minimnya kesempatan kerja yang ada
- b. Tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang rendah menyebabkan kurang dapat bersaing dengan pencari kerja lain yang lebih berkompeten
- c. Kesesuaian latar belakang pendidikan dan pengalaman pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia

Perbandingan dengan tahun lalu:

Di tahun 2023, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Wonogiri sebesar 98,08% ($100\% - TPT = 100\% - 1,92\%$). Sedangkan untuk 2024 ini perhitungan TKK masih menunggu dari BPS.

Sasaran II: *Menurunnya Pengangguran*

Indikator : Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Target : 56,36%

Faktor pendukung keberhasilan:

- a. Adanya inovasi Jendela Kerja yang dapat mendorong dan mengarusutamakan penempatan seperti Job Fair Virtual, Career Class, Live Instagram ("Ngos-ngosan"), pemanfaatan link portal lowongan kerja (Sisnaker dan e-Makaryo) dan upgrading fungsi BKK di SMK.
- b. Kemampuan soft skill dan hard skill yang dimiliki pencari kerja.
- c. Pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh pencari kerja.
- d. Kesesuaian lowongan kerja yang dilamar dengan kualifikasi pencari kerja.

Faktor penghambat keberhasilan:

- a. Kurangnya kemampuan soft skill dan hard skill yang dimiliki pencari kerja
- b. Kurangnya pengalaman kerja yang dimiliki oleh pencari kerja
- c. Adanya ketidaksesuaian lowongan yang tersedia dengan minat pencari kerja

Perbandingan dengan tahun lalu:

Di tahun 2023 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan berasal dari perhitungan sebagai berikut:

(Jumlah pencari kerja yang ditempatkan : Jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100% = $(7.499 : 10.413) \times 100\% = 72,01\%$

Sedangkan untuk tahun 2024, perhitungan secara keseluruhan akan dihitung di akhir tahun.

Indikator : *Besaran kompetensi calon tenaga kerja*

Target : 13,37%

Faktor pendukung keberhasilan:

- a. Adanya program WRP (*Work Readiness Program*) yang mendorong dalam hal peningkatan penyiapan calon tenaga kerja yang berorientasi ke pasar kerja seperti Aplikasi "AyoKerjo" dan bimtek unit penyiapan calon tenaga kerja dengan berorientasi pada future job.
- b. Tingginya minat pencari kerja dalam mengikuti pelatihan kompetensi untuk meningkatkan kompetensi mereka.
- c. Adanya dorongan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan UPTD BLK untuk mendorong masyarakat mengikuti program pelatihan.
- d. Adanya program pelatihan yang menarik/ *up to date*.

Faktor penghambat keberhasilan:

Kurangnya minat pencari kerja dalam mengikuti pelatihan kompetensi dan juga adanya keterbatasan anggaran.

Perbandingan dengan tahun lalu:

Di tahun 2023, Besaran kompetensi calon tenaga kerja ini dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

(Jumlah calon tenaga kerja yang kompeten : Jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100% = $(8.795 : 10.413) \times 100\% = 84,46\%$

Sedangkan untuk tahun 2024, perhitungan secara keseluruhan akan dihitung di akhir tahun.

Indikator : *Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun*

Target : 2,05%

Faktor pendukung keberhasilan:

- a. Peran aktif pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri khususnya di Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam membantu menyelesaikan sengketa pengusaha pekerja (Mediator).

- b. Adanya sikap proaktif antara user (pengguna tenaga kerja) dengan tenaga kerja yang bersengketa.
- c. Pemahaman akan aturan ketenagakerjaan dalam penyelesaian sengketa.

Faktor penghambat keberhasilan:

Hal yang menghambat penyelesaian sengketa pengusaha pekerja, yakni kurangnya proaktif perusahaan yang bersangkutan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dalam kaitannya sengketa dengan pekerjanya.

Perbandingan dengan tahun lalu:

Di tahun 2023, Jumlah perusahaan sampai akhir tahun 2023 setelah melewati pergerakan yang fluktuatif (karena perusahaan *merger*, tutup dan prioritas yang dihitung adalah perusahaan yang memiliki lebih dari 10 pegawai) didapat sebanyak 490 perusahaan. Maka, angka sengketa pengusaha pekerja per tahun sebagai berikut:

$$(\text{Jumlah sengketa pengusaha pekerja} : \text{Jumlah perusahaan}) \times 100\% = (3 : 490) \times 100\% = 0,61\%$$

Realisasi capaian kinerja perangkat daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sebagaimana terdapat dalam tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja yang telah mencapai/melampaui target pada tahun 2023 hingga Triwulan I 2024 adalah sebagai berikut :
 - 1) Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang menjadi Agen Perubahan;
 - 2) Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - 3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - 4) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan;
 - 5) Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja;
 - 6) Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT).
2. Indikator kinerja yang belum mencapai target/belum dapat dihitung sampai dengan Triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut :
 - 1) Nilai Kematangan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - 2) Rasio Penduduk yang Berwirausaha
 - 3) Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - 4) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - 5) Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun.

Adapun target kinerja beserta capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No.	Indikator Tujuan/ Sasaran	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Nilai Kematangan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	-	44	44	45	45	46	46	42	40	40	n/a	45	46	46	Hasil Nilai Kematangan Organisasi 2024 rilis di tahun 2025
2.	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	-	75,17	75,20	75,50	76,50	77,50	78,50	78,14	71,96	78,05	78,05	76,50	77,50	78,50	Hasil Nilai SAKIP 2023 rilis di tahun 2024 (data sampai Triwulan I 2024)
3.	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	-	60	65	70	75	81	81,50	67,23	67,33	71,25	n/a	75	81	81,50	Perhitungan IP ASN di akhir tahun 2024
4.	Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang menjadi Agen Perubahan	-	-	1	1	2	3	4	5	1	3	4	4	3	4	5	Berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Wonogiri No: 746 Th. 2022 tentang Penetapan Agen Perubahan pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Wonogiri Tahun 2022 (data sampai bulan April 2023)

No.	Indikator Tujuan/ Sasaran	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
5.	Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja	-	-	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	1	1	1	Inovasi yang dijalankan: WRP dan Super Gen-Z
6.	IKM Dinas Tenaga Kerja	-	-	90	90	91	91	91	91	90,03	89,74	91,52	91,97	91	91	91	Perhitungan IKM di akhir tahun (data sampai bulan April 2023)
7.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	-	-	95,73%	95,90%	96,15%	96,40%	96,70%	97,00%	97,57%	98,05%	98,08%	98,08%	96,40%	96,70%	97,00%	Perhitungan TKK menunggu perhitungan TPT 2024 dari BPS
8.	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	-	-	40%	55,16%	56,36%	57,20%	58,03%	61,19%	62,42%	67,88%	72,01%	81,07%	57,20%	58,03%	61,19%	Perhitungan Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan hingga bulan April 2023
9.	Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja	-	-	9,55%	11,46%	13,37%	15,28%	17,19%	19,10%	5,05%	26,38%	84,46%	20,56%	15,28%	17,19%	19,10%	Perhitungan Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja hingga bulan April 2023
10.	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun	-	-	2,37%	2,21%	2,05%	1,89%	1,73%	1,57%	n/a	0,6%	0,61%	n/a	1,89%	1,73%	1,57%	Perhitungan Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun ini di akhir tahun
11.	Rasio Penduduk yang	-	-	3,65%	3,75%	3,85%	3,95%	4,05%	4,15%	3,87%	3,90%	3,96%	n/a	3,95%	4,05%	4,15%	Perhitungan Rasio Penduduk yang Berwirausaha

No.	Indikator Tujuan/ Sasaran	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Berwirausaha																ini dilakukan di akhir tahun
12.	Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	-	-	125 peng usaha	200 peng usaha	250 peng usaha	300 peng usaha	350 peng usaha	400 peng usaha	153 peng usaha	210 peng usaha	320 peng usaha	4 peng usaha	300 peng usaha	350 peng usaha	400 peng usaha	Hingga Triwulan I 2024, Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) sebanyak 4 pengusaha

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian kinerja bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri senantiasa berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Perindustrian terkait program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis masing-masing.

Untuk Urusan Ketenagakerjaan, arah kebijakan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional;
2. Membangun integrasi, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja;
3. Mengembangkan program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk membentuk tenaga kerja mandiri dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan;
4. Mengembangkan dan mengelola potensi kreatif generasi milenial menjadi talenta muda yang siap menyambut *future job* yang dinamis dan fleksibel;
5. Mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas negara penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal dan memasifikasi pengisian jabatan di sektor formal;
6. Mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan ketenagakerjaan yang dapat menjamin pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 yang berintegritas dan kredibel;
8. Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan sebagai ekosistem digital ketenagakerjaan terbesar di Indonesia;

9. Mengembangkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, lincah, inovatif, dan responsif untuk mencapai kinerja maksimal dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Sedangkan untuk Urusan Perindustrian, arah kebijakan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam Dokumen Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas;
2. Penguatan Implementasi *Making Indonesia 4.0*;
3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri;
4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri;
5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
6. Meningkatnya Persebaran Industri;
7. Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif;
8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan;
9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien;
10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian;
11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas;
12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima;
13. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel.

Kebijakan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terkait isu strategis Urusan Ketenagakerjaan adalah mengurangi jumlah pengangguran, dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran dan target tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas canaker sesuai kebutuhan pasar kerja dengan mengoptimalkan peran BLK;
2. Meningkatkan fungsi aplikasi e-makaryo menjadi database ketenagakerjaan untuk menganalisa kebutuhan pasar kerja;
3. Meningkatkan keberadaan dan kinerja UMK (Usaha Mikro Kecil) dan UMB (Usaha Menengah Besar);

4. Terkait dengan peningkatan kinerja UMK maka perlu ditingkatkan peran OPD terkait dengan produksi.

Sedangkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, isu strategis yang diangkat adalah Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran dan target tersebut adalah:

1. Optimalisasi kawasan industri dan industri yang menyerap tenaga kerja;
2. Peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan hilirisasi industri;
3. Pengembangan inovasi teknologi produksi;
4. Penguatan IKM yang mencakup aspek modal, pemasaran dan standarisasi produk;
5. Harmonisasi peran Stakeholder hulu hilir Pengembangan bahan baku industri substitusi impor;
6. Peningkatan data informasi industri dan kawasan industri Integrasi sektor pendukung urusan industri;

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri berdasarkan arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, untuk Urusan Ketenagakerjaan terdapat permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

1. Minimnya sumber daya manusia aparatur yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri;
2. Minimnya alokasi anggaran untuk bidang Ketenagakerjaan sehingga yang menjadi strategi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri untuk mengarusutamakan sektor-sektor pengungkit agar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Kaitannya dengan Balai Pelatihan Vokasi, untuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang lebih *update* karena dengan seiring perkembangan zaman, dunia usaha dan industri pun sudah menggunakan peralatan yang lebih modern;
4. Kompetensi yang dimiliki oleh calon tenaga kerja masih belum sesuai dengan permintaan pasar kerja;
5. Sarana Hubungan Industrial di perusahaan juga masih banyak yang memerlukan pembinaan, akan tetapi sumber daya manusia aparatur untuk bidang hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja juga sangat minim.

Sedangkan permasalahan dan hambatan untuk Urusan Perindustrian, diuraikan sebagai berikut:

1. Rendahnya daya saing produk industri;
2. Ketimpangan ekonomi wilayah Jawa Tengah;
3. Belum terintegrasinya peran stakeholder industri.

Berkaitan dengan permasalahan dan hambatan di atas akan sangat berpengaruh atau berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dengan sumber daya manusia aparatur yang minim dan anggaran yang terbatas, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri berupaya untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengadakan inovasi-inovasi guna mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, baik target strategis, target tahunan maupun target dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

Tantangan

1. Kualitas SDM pencari kerja yang masih perlu ditingkatkan melalui program-program *upgrading softskill*;
2. Penanganan peserta pelatihan yang berasal dari generasi Z;
3. Mendorong perusahaan untuk berperan aktif dalam melaporkan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan;
4. Mewujudkan program pelatihan yang inovatif bagi masyarakat/pencari kerja;
5. Mendorong perusahaan untuk mempunyai alat HI (Hubungan Industrial) yang lengkap termasuk penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro;
6. Peningkatan kapasitas SDM Bidang Perindustrian;
7. Peningkatan kualitas dan pemasaran produk industri.

Peluang

1. Peningkatan kompetensi bagi para pencari kerja melalui *upgrading softskill*, meskipun dengan kemampuan anggaran yang terbatas namun tetap berupaya untuk bekerja sama dengan sekolah maupun Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dalam rangka menciptakan kompetensi pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
2. Penanganan pencari kerja dengan usia generasi Z melalui model komunikasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;

3. Dalam menyikapi isu strategis wajib lapor lowongan pekerjaan, akan lebih memudahkan dalam membuat *link and match* antara kebutuhan tenaga kerja dan penyiapan ketersediaan tenaga kerja namun untuk teknisnya mungkin perlu formulasi khusus guna menunjang kelancaran program tersebut;
4. Melalui anugerah penghargaan yang diraih UPTD BLK Kabupaten Wonogiri dalam ajang Vokasi Award, diharapkan UPTD BLK mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Balai Pelatihan Vokasi dengan program-program pelatihan yang inovatif bagi masyarakat;
5. Mengundang HRD Perusahaan untuk mengikuti Bimtek Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro;
6. Pemberian pelatihan bagi pelaku usaha industri agar semakin kreatif dan inovatif dalam menciptakan suatu produk industri;
7. Penggunaan bahan baku pilihan agar kualitas produk tetap terjaga dan memiliki daya saing yang kompetitif serta memiliki sasaran pasar yang tepat.

Berdasarkan dari isu-isu strategis nasional dan provinsi serta permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Wonogiri, maka untuk tahun 2025 memerlukan perumusan program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan isu strategis guna mencapai tujuan dan sasaran daerah pada umumnya serta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri pada khususnya, maka dirumuskan program dan kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut dalam :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK);
2. Program Penempatan Tenaga Kerja, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 - 3) Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota;
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
 - 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 - 3) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;

4. Program Hubungan Industrial, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
6. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.
7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 pada kerangka pendanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Namun, seiring berjalannya proses dan tahapan perencanaan terdapat perubahan pendanaan pada program dan kegiatan Tahun 2025 dalam rangka menyikapi kebijakan-kebijakan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Kerangka pendanaan program dan kegiatan yang semula pagu indikatif totalnya sejumlah Rp 9.943.655.833 untuk mendanai 6 (enam) program yang terdiri dari 19 (sembilan belas) kegiatan berkurang menjadi Rp 7.725.532.829,00 untuk jumlah program dan kegiatan yang sama. Adapun uraian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang semula pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 9.503.735.563,00

menjadi Rp 7.225.991.735,00, hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi pada kegiatan berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang semula Rp 0,- menjadi Rp 19.999.750,00;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang semula Rp 8.817.910.094,00 menjadi Rp 6.493.558.118,00;
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang semula Rp 89.971.963,00 menjadi Rp 79.999.360,00;
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang semula Rp 465.934.096,00 menjadi Rp 548.981.015,00;
 - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang semula Rp 109.923.218,00 menjadi Rp 63.457.300,00.
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja yang semula pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 35.000.000,00 menjadi Rp 4.999.800,00, hal ini disebabkan adanya rasionalisasi pada Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan besaran yang sama pada Program. Pada tahun 2025 untuk program ini hanya direncanakan 1 (satu) kegiatan.
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang semula pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 156.974.225,00 menjadi Rp 223.348.944,00, hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi pada kegiatan berikut:
- 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang semula Rp 149.474.225,00 menjadi Rp 217.348.950,00;
 - 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang semula Rp 7.500.000,00 menjadi Rp 2.999.994,00;
 - 3) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja yang semula Rp 0,00 menjadi Rp 3.000.000,00.
4. Program Penempatan Tenaga Kerja yang semula pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 114.965.458,00 menjadi Rp 143.497.780,00, hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi pada kegiatan berikut:
- 1) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota yang semula Rp 39.975.563,00 menjadi Rp 91.721.470,00;
 - 2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang semula Rp 64.989.993,00 menjadi Rp 46.776.440,00;
 - 3) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota yang semula Rp 9.999.902,00 menjadi Rp 4.999.870;

5. Program Hubungan Industrial yang semula pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 32.992.595,00 menjadi Rp 30.694.970,00, hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi pada kegiatan berikut:
 - 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang semula Rp 12.000.000,00 menjadi Rp 8.999.990,00;
 - 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota yang semula Rp 20.992.595,00 menjadi Rp 21.694.980,00.
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang semula pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 49.999.282,00 menjadi Rp 60.000.000,00, hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan besaran yang sama pada Program. Pada tahun 2025 untuk program ini hanya direncanakan 1 (satu) kegiatan.
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri yang semula pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 24.993.720,00 menjadi Rp 12.000.000,00, hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi pada Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan besaran yang sama pada Program. Pada tahun 2025 untuk program ini hanya direncanakan 1 (satu) kegiatan.
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang semula pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 24.994.990,00 menjadi Rp 24.999.600,00, hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi pada Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan besaran yang sama pada Program. Pada tahun 2025 untuk program ini hanya direncanakan 1 (satu) kegiatan.

Adapun secara ringkasnya data perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100%	9.503.735.563	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100%	7.225.991.735	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	19.999.750	Direncanakan untuk persiapan penyusunan RPJPD dan dokumen perencanaan lainnya
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	100%	8.817.910.094	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	100%	6.493.558.118	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase tertib administrasi kepegawaian	100%	9.996.192	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase tertib administrasi kepegawaian	100%	9.996.192	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100%	89.971.963	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100%	79.999.360	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	10.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	465.934.096	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	548.981.015	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	109.923.218	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	63.457.300	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
2.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase perusahaan yang telah menyusun rencana tenaga kerja	7,1%	10.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase perusahaan yang telah menyusun rencana tenaga kerja	7,1%	4.999.800	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah jenis dokumen PTK disusun	1 jenis	10.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah jenis dokumen PTK disusun	1 jenis	4.999.800	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	1,24%	156.974.225	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	1,24%	223.348.994	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	2.400 peserta	149.474.225	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	2.400 peserta	217.348.950	Mengakomodir usulan musrenbang dan alokasi DBHCHT
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Program Pelatihan yang sudah link <i>and match</i> dengan Perusahaan	10 program	7.500.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah program pelatihan yang sudah link and mach dengan perusahaan	10 program	2.999.994	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	100%	0	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	100%	3.000.000	
4.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	58,03%	114.965.458	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	58,03%	143.497.780	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	7.250 orang	39.975.563	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	7.250 orang	91.721.470	Rasionalisasi anggaran
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Lowongan Kerja yang Bisa Dibangun <i>Link and Match</i> nya	9.000 lowongan	64.989.993	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Lowongan Kerja yang Bisa Dibangun <i>Link and Match</i> nya	9.000 lowongan	46.776.440	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Pencari Kerja Migran yang Ditempatkan	100 orang	9.999.902	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Pencari Kerja Migran yang Ditempatkan	100 orang	4.999.870	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dalam Kepmen 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tidak terdapat nomenklatur untuk kegiatan tersebut.
5.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS	13%	32.992.595	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar	13%	30.694.970	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ketenagakerjaan)					Peserta BPJS Ketenagakerjaan)			
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Perusahaan Yang mempunyai sarana HI	10 perusahaan	12.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Perusahaan Yang mempunyai sarana HI	10 perusahaan	8.999.990	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Perusahaan yang menindak lanjuti pembinaan ketenagakerjaan	10 perusahaan	20.992.595	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Perusahaan yang menindak lanjuti pembinaan ketenagakerjaan	10 perusahaan	21.694.980	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
6.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase Kontribusi sektor industri dalam PDRB	17,80%	49.999.282	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase Kontribusi sektor industri dalam PDRB	17,80%	60.000.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase IKM yang diberdayakan	1,50%	49.999.282		Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase IKM yang diberdayakan	1,50%	60.000.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
7.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase peningkatan jumlah pelaku industri	5%	24.993.720	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase peningkatan jumlah pelaku industri	5%	12.000.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah IUI yang diterbitkan	10 IUI	24.993.720	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah IUI yang diterbitkan	10 IUI	12.000.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
8.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Proporsi pelaku usaha industri yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	0,56%	24.994.990	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Proporsi pelaku usaha industri yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	0,56%	24.999.600	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Cakupan wilayah informasi industri	14 Kecamatan	24.994.990	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Cakupan wilayah informasi industri	14 Kecamatan	24.999.600	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan usulan musrenbang desa/kelurahan tahun 2024 yang masuk dalam aplikasi SIPD-RI (Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia), terdapat 3 (tiga) Proposal Usulan yang memuat 3 Kegiatan, yakni antara lain:

- 1) Pelatihan Menjahit dan Pengadaan Mesin Jahit
- 2) Pelatihan Membatik
- 3) Pelatihan Perbengkelan

Dari ketiga usulan tersebut yang diakomodir oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri hanya 2, yakni Pelatihan Menjahit dan Pengadaan Mesin Jahit dan Pelatihan Membatik. Kedua usulan tersebut telah diverifikasi dari aplikasi SIPD kemudian diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

Setelah melalui analisis dan verifikasi, usulan yang masuk mengarah pada usulan pelatihan/ peningkatan kompetensi sehingga dapat diakomodir melalui Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi. Rangkuman dari usulan diantaranya sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Wonogiri
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

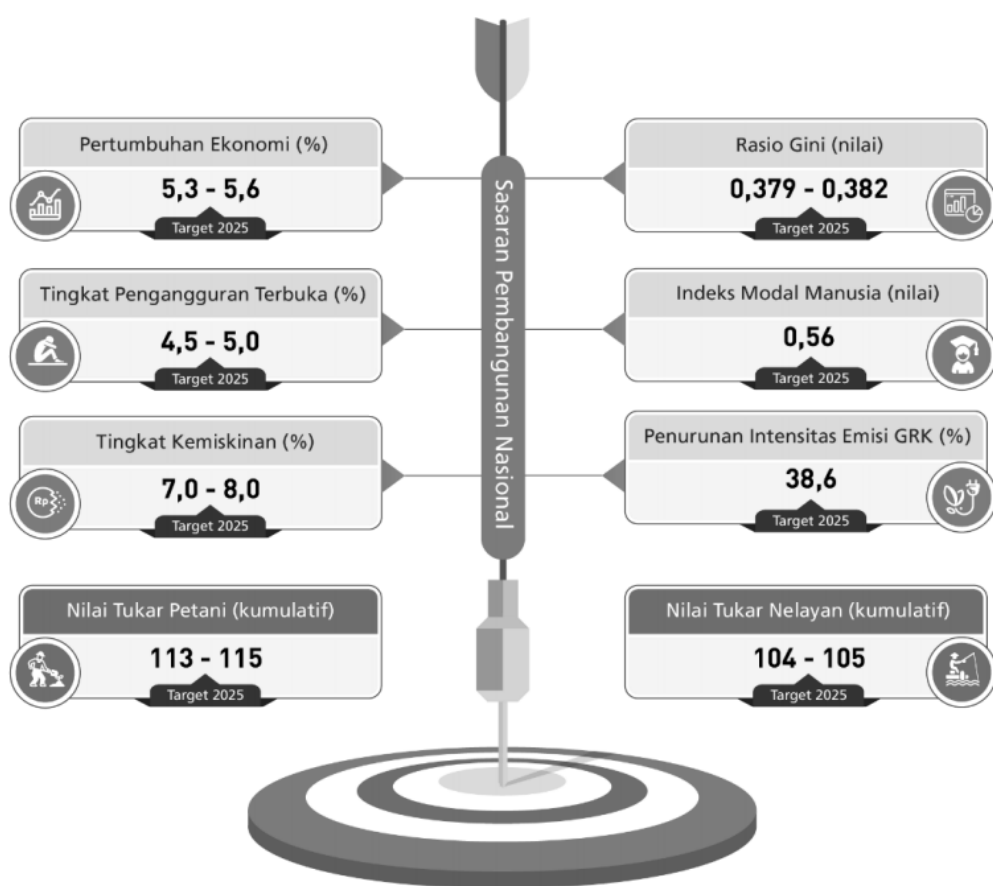
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Desa Klunggen, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	1 Paket	

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	1 Paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.



Gambar IV.1
Sasaran Pembangunan Tahun 2025
Sumber : Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan RKP 2025

Sasaran pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2025 yang ingin dicapai yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 – 5,6%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5 – 5,0%
3. Tingkat Kemiskinan 7,0 – 8,0%
4. Rasio Gini 0,379 – 0,382
5. Indeks Modal Manusia 0,56
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK 38,6
7. Nilai Tukar Petani 113 – 115
8. Nilai Tukar Nelayan 104 – 105.

Untuk membangun dasar yang kokoh guna mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 dan mencapai target pembangunan tahun 2025, prioritas nasional yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

PRIORITAS NASIONAL 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	PRIORITAS NASIONAL 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
PRIORITAS NASIONAL 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.	PRIORITAS NASIONAL 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
PRIORITAS NASIONAL 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	PRIORITAS NASIONAL 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
PRIORITAS NASIONAL 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.	PRIORITAS NASIONAL 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Gambar IV.2

Prioritas Nasional Tahun 2025

Sumber : Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan RKP 2025

3.1.1. Kementerian Ketenagakerjaan

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, dalam hal arah kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan, terdapat 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Arah Kebijakan 1:

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi dan meningkatkan produktivitas pekerja di sektor prioritas. Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi;
- 2) Meningkatkan produktivitas pekerja;
- 3) Meningkatkan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan;
- 5) Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja;
- 6) Meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan;

- 7) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
- 8) Menyusun standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
- 9) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pelatihan dan produktivitas.

Arah Kebijakan 2:

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan. Upaya penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan di dalam negeri;
- 2) Meningkatkan perlindungan dalam penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri;
- 3) Meningkatkan tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja;
- 4) Meningkatkan jumlah wirausaha baru melalui inkubasi bisnis
- 5) Melaksanakan pengendalian tenaga kerja asing (TKA) melalui pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel;
- 6) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan penempatan dan meningkatnya pelayanan informasi pasar kerja penempatan tenaga kerja dalam negeri.

Arah kebijakan 3:

Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan peran pengawasan ketenagakerjaan dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dengan kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan. Upaya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Meningkatkan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan;
- 2) Meningkatkan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;

- 3) Meningkatkan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak;
- 4) Meningkatkan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- 5) Meningkatkan kualitas dan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- 6) Menurunkan tingkat risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
- 7) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan;

Arah Kebijakan 4:

Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan. Upaya pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Meningkatkan kuantitas/kualitas kelembagaan hubungan industrial;
- 2) Meningkatkan penerapan kebijakantentang pengupahan serta struktur dan skala upah;
- 3) Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- 4) Meningkatkan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dan pengusaha melalui pengaturan syarat kerja;
- 5) Meningkatkan program, manfaat, dan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- 6) Peningkatan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja.

Arah Kebijakan 5:

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya, dengan sasaran program meningkatkan kapasitas, kinerja organisasi dan pelayanan internal. Upaya peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara:

- 1) Meningkatkan pelayanan perencanaan untuk mendukung kinerja dan akuntabilitas kementerian yang lebih baik;

- 2) Meningkatkan tata kelola keuangan kementerian;
 - 3) Meningkatkan manajemen organisasi dan aparatur;
 - 4) Meningkatkan kualitas penyusunan dan penataan perundang-undangan;
 - 5) Meningkatkan kepuasan pengguna layanan umum dan pengelolaan arsip Kementerian Ketenagakerjaan;
 - 6) Meningkatkan tindak lanjut atas kerja sama luar negeri;
 - 7) Meningkatkan kemudahan akses, keterbukaan dan pelayanan informasi publik;
 - 8) Meningkatkan SDM Kementerian Ketenagakerjaan yang kompeten sesuai dengan rencana pengembangan SDM;
 - 9) Meningkatkan kompetensi masyarakat di bidang ketenagakerjaan.
- Arah Kebijakan 6:

Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengawasan internal dalam mendukung *good governance* di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Upaya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakeijaan dilakukan dengan cara:

- 1) Mewujudkan pengawasan Inspektorat I yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- 2) Mewujudkan pengawasan Inspektorat II yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- 3) Mewujudkan pengawasan Inspektorat III yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- 4) Mewujudkan pengawasan Inspektorat IV yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;

- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan internal dan eksternal Inspektorat Jenderal.

Arah Kebijakan 7:

Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan secara elektronik. Perencanaan, penelitian dan pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara:

- 1) Meningkatkan nilai indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Ketenagakerjaan;
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan tenaga kerja;
- 3) Meningkatkan nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan;
- 4) Menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang akurat dan terkini;
- 5) Meningkatkan hasil penelitian, dan kajian serta model yang bermanfaat;
- 6) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri juga ikut mendukung dan merencanakan program dan kegiatan yang sinkron terhadap arah kebijakan dan strategi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

3.1.2. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian dan Perdagangan Tahun 2020-2024, arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan industri, melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

- 1) Kebijakan pengembangan sumber daya industri;

Kebijakan pengembangan sumber daya industri dilaksanakan melalui:

- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan sasaran meningkatkan tenaga kerja industri yang kompeten; dan
- b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
 - 2) Penguatan implementasi *Making Indonesia 4.0*;
 - 3) Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri; dan
 - 4) Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri.
- 2) Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri;
Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu:
- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan 2 (dua) sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatkan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi industri; dan
 - 2) Meningkatkan infrastruktur kompetensi industri.
 - b. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan sasaran terwujudnya sistem informasi industri yang andal dan efektivitas publikasi kinerja industri.
 - c. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan 2 (dua) sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas; dan
 - 2) Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri.
- 3) Kebijakan pemberdayaan industri;
Kebijakan pemberdayaan industri dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu:
- a. Program nilai tambah dan daya saing industri dengan 4 (empat) sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
 - 2) Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri;
 - 3) Meningkatnya penguasaan pasar industri; dan
 - 4) Penguatan kewirausahaan dan industri kecil dan menengah (IKM).
 - b. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan sasaran meningkatnya fasilitasi halal dan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- 4) Kebijakan pengembangan perwilayahan industri;

Kebijakan pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan melalui program nilai tambah dan daya saing industri dengan sasaran meningkatnya persebaran industri. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri bertujuan untuk membangun pusat-pusat industri baru dalam rangka penyebaran dan pemerataan pembangunan industri melalui:

- a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).
- b. Kawasan Peruntukan Industri (KPI).
- c. Kawasan Industri (KI).
- d. Pembangunan atau revitalisasi sentra IKM

5) Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal;

Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal diarahkan pada sasaran utama mempercepat pembangunan industri, melalui empat fokus kegiatan utama, yaitu:

- a. Upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor industri dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas (peningkatan kinerja ekspordan kemampuan substitusi impor, serta penyiapan SDM Industri yang kompeten);
- b. Upaya penguatan dan pendalaman struktur industri nasional bagi investasi baru sektor industri (khususnya industri pioner) atau perusahaan industri existing yang melakukan perluasan komoditi baru;
- c. Upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi dan penguasaan teknologi baru; dan
- d. Upaya pemerataan pembangunan sektor industri di seluruh wilayah Indonesia.

6) Kebijakan reformasi birokrasi.

Kebijakan reformasi birokrasi dilaksanakan melalui Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan 3 (tiga) sasaran yaitu:

- a. Terwujudnya tata kelola Kementerian yang efektif dan efisien;
- b. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian; dan
- c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.
- 3) Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat

Tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 tersebut yang menjadi pedoman dalam perumusan dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 ini.

Sasaran dari dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 juga menjadi acuan dalam menentukan sasaran pada dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025 ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri;
- 2) Menurunnya pengangguran.
- 3) Masyarakat yang mandiri ekonominya

Adapun tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menjalankan pembangunan bidang tenaga kerja dan perindustrian pada Tahun 2025.

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pada dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, dimana di dalamnya memuat kerangka program, kegiatan, indikator kinerja, dan kerangka pendanaan Tahun 2025. Adapun program yang merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang akan dilaksanakan mencakup 8 (delapan) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan yang sangat mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana sudah dirumuskan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Untuk Tahun 2025, adapun target yang akan dicapai untuk

bidang tenaga kerja yakni menurunkan angka pengangguran sebesar 3,30% dan untuk bidang perindustrian yakni meningkatkan masyarakat yang mandiri ekonominya sebesar 350 pengusaha pada target kinerja sesuai dengan Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun total pagu indikatif yang akan digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri adalah sebesar Rp 7.725.532.829,00 (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

PROGRAM NON URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Program Penempatan Tenaga Kerja.
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja.
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
4. Program Hubungan Industrial.

PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

KEGIATAN NON URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).
2. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
3. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
4. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
5. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota.
6. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
7. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.
8. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
9. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
2. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN						7.725.532.829,00							7.725.532.829,00	
	2	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.628.533.229,00							7.628.533.229,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG TENAGA KERJA						7.628.533.229,00							7.628.533.229,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100%			100%	7.225.991.735,00						100%	7.225.991.735,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%				19.999.750,00				1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	100%	19.999.750,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.				
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	19.999.750,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	5 Dokumen	19.999.750,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												kemiskinan dan peng angguran.				
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	100%			100%	6.493.558.118,00			-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	100%	6.493.558.118,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ bulan			37 Orang/ bulan	6.493.558.118,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	45 Orang/ bulan	6.493.558.118,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.				
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	100%			100%	9.996.192,00			-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjutan an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	100%	9.996.192,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang			6 orang	9.996.192,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	6 orang	9.996.192,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100%			100%	79.999.360,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	100%	79.999.360,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.				
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket			4 paket	4.000.000,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	4 paket	4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket			4 paket	11.999.660,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 paket	11.999.660,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket			20 paket	3.999.700,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	20 paket	3.999.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.				
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket			3 paket	10.000.000,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	3 paket	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan			24 laporan	50.000.000,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	24 laporan	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	0%			100%	10.000.000,00			-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper		0%	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.				
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	0 unif			1 unit	10.000.000,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	0 unit	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang</i>	100%			100%	548.981.015,00			-	1. Peningka tan kapasitas	Dinas Tenaga Kerja	100%	548.981.015,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Urusan Pemerintahan Daerah	urusan pemerintah daerah									perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.	dan Perindustrian			DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 laporan			7 laporan	1.000.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memperkuat	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	7 laporan	1.000.000,00	DINAS TENAGAKERJADAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.				
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan			36 laporan	151.800.000,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	36 laporan	151.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	19 laporan			19 laporan	396.181.015,00	Kab. Wono giri,	PEN DAPAT AN	-	1. Peningkatan kapasitas	Dinas Tenaga Kerja	19 laporan	396.181.015,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Umum Kantor yang Disediakan						Wono giri, Giri purwo	BAGI HASIL		perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.	dan Perindustri an			DAN PERINDUS TRIAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%			100%	63.457.300,00			-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	100%	63.457.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.				
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit			31 unit	39.999.200,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	31 unit	39.999.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit			20 unit	3.000.000,00	Kab. Wono giri, Wono giri,	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian an yang	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri	20 unit	3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Giri purwo			berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.	an			TRIAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 unit			1 unit	17.960.000,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	1 unit	17.960.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.				
	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	10 unit			10 unit	2.498.100,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	10 unit	2.498.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase perusahaan yang telah menyusun Rencana Tenaga Kerja	7,1%			7,1%	4.999.800,00						7,1%	4.999.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(RTK)													
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah jenis dokumen RTK yang disusun	1 dokumen			1 dokumen	4.999.800,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 dokumen	4.999.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	5 orang			5 orang	4.999.800,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	5 orang	4.999.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.				
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVIT AS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	1,24%			1,24%	223.348.944,00						1,24%	223.348.944,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	2.580 peserta			2.400 peserta	217.348.950,00			-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	2.580 peserta	217.348.950,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.				
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	1.500 orang			2.000 orang	150.000.000,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	DBH CUKAI HASIL TEMBA KAU (CHT), PENDA PATAN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	1.500 orang	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			<i>Jumlah Kesepakatan/ Ko ordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana</i>	10 lembaga			10 lembaga	17.349.000,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	10 lembaga	17.349.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n									sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.				
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	14 unit			14 unit	49.999.950,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	14 unit	49.999.950,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												mengurangi kemiskinan dan pengangguran.				
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah program pelatihan yang sudah link and match dengan perusahaan	10 program			10 program	2.999.994,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	10 program	2.999.994,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	28 lembaga			28 lembaga	2.999.994,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	28 lembaga	2.999.994,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.				
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	100%			100%	3.000.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	100%	3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi														
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 perizinan			7 perizinan	3.000.000,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	5 perizinan	3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	58,03%			58,03%	143.497.780,00						58,03%	143.497.780,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	7.250 orang			7.250 orang	91.721.470,00			-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	7.250 orang	91.721.470,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.				
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	5.000 orang			5.000 orang	25.499.880,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjutan an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	5.000 orang	25.499.880,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												dan peng angguran.				
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>	500 orang			500 orang	34.999.740,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	500 orang	34.999.740,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD</i>	10 orang			10 orang	31.221.850,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	10 orang	31.221.850,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.				
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Lowongan Kerja yang Bisa Dibangun Link and Match nya	10.000 lowongan kerja			9.000 lowongan kerja	46.776.440,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	10.000 lowongan kerja	46.776.440,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														
			<i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>	12 dokumen			12 dokumen	9.999.650,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	12 dokumen	9.999.650,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>	600 orang			600 orang	9.999.840,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	600 orang	9.999.840,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.				
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	750 orang			750 orang	26.776.950,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	750 orang	26.776.950,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pencari Kerja Migran yang Ditempatkan	100 orang			100 orang	4.999.870,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	100 orang	4.999.870,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	5 orang			5 orang	4.999.870,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Girepurwo	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	5 orang	4.999.870,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.				
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	13%			13%	30.694.970,00						13%	30.694.970,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perusahaan yang mempunyai sarana HI	10 perusaha an			10 perusaha an	8.999.990,00			-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	10 perusaha an	8.999.990,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.				
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 perusahaan			10 perusahaan	5.000.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giri purwo	PEN DAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	10 perusahaan	5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah, dan	1 laporan			1 laporan	3.999.990,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giri	PEN DAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 laporan	3.999.990,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan						purwo			saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.				
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perusahaan yang menindaklanjuti pembinaan ketenagakerjaan	10 perusaha an			10 perusaha an	21.694.980,00			-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	10 perusaha an	21.694.980,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.				
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>	50 perkara			50 perkara	5.197.420,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	50 perkara	5.197.420,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan</i>	3 perkara			3 perkara	4.000.000,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	3 perkara	4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.				
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga			1 lembaga	10.497.880,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 lembaga	10.497.880,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.				
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			<i>Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>	300 orang			300 orang	1.999.680,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	300 orang	1.999.680,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN
	3	URUSAN PEMERINTAH AN PILIHAN						96.999.600,00							96.999.600,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERINDUSTRI AN						96.999.600,00							96.999.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANA AN DAN PEMBANGUN AN INDUSTRI	<i>Persentase Kontribusi sektor industri dalam PDRB</i>	17,80%			17,80%	60.000.000,00						17,08%	60.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	<i>Persentase IKM yang diberdayakan</i>	2%			1,50%	60.000.000,00			-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	2%	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	1 dokumen			1 dokumen	60.000.000,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	1 dokumen	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.				
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALI AN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Peningkatan jumlah pelaku industri (unit usaha)	5%			5%	12.000.000,00						5%	12.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IUI yang diterbitkan	12 IUI			10 IUI	12.000.000,00			-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjutan an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	12 IUI	12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.				
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab/ Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 dokumen			1 dokumen	7.000.000,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya saing dan berkelanjut an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	1 dokumen	7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ sta ndar kegiatan	1 dokumen			1 dokumen	5.000.000,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomi an yang berdaya	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	1 dokumen	5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat						purwo			saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.				TRIAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Proporsi pelaku usaha industri yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	0,56%			0,56%	24.999.600,00						0,56%	24.999.600,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk	Cakupan Wilayah Informasi Industri	16 kecamatan			14 kecamatan	24.999.600,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian	Dinas Tenaga Kerja dan	16 kecamatan	24.999.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota										an yang berdaya saing dan berkelanjutan an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan peng angguran.	Perindustri an			PERINDUS TRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen			1 dokumen	10.000.000,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningka tan kapasitas perekonomian an yang berdaya saing dan berkelanjutan an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	1 dokumen	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.				
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	1 dokumen			1 dokumen	14.999.600,00	Kab. Wono giri, Wono giri, Giri purwo	PEN DAPAT AN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan an berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memper kuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	1 dokumen	14.999.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN
	JUMLAH							7.725.532.829,00							7.725.532.829,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditentukan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri untuk pencapaian tujuan tahun 2021-2026, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Adapun program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 mencakup program dan kegiatan pokok dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri
Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		7.725.532.829
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/WONOGIRI	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	7.225.991.735
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	19.999.750
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.999.750
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	6.493.558.118
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.493.558.118
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	9.996.192
2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9.996.192
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	79.999.360
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.000.000
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11.999.660
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.999.700

2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.000.000
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	10.000.000
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10.000.000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	548.981.015
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	151.800.000
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	396.181.015
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	63.457.300
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39.999.200
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.000.000
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17.960.000
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.498.100
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase perusahaan yang telah menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	4.999.800
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah jenis dokumen RTK yang disusun	4.999.800

2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	4.999.800
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	223.348.944
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan berbasis Kompetensi	217.348.950
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	150.000.000
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	17.349.000
2	07	03	2.01	0002	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	49.999.950
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Program Pelatihan yang sudah <i>link and match</i> dengan perusahaan	2.999.994
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	2.999.994
2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang Memiliki Perijinan	3.000.000
2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	3.000.000
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	143.497.780
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	91.721.470
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	25.499.880
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	34.999.740

2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	31.221.850
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang bisa dibangun <i>link and match</i> nya	46.776.440
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	9.999.650
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	9.999.840
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	26.776.950
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja migran yang ditempatkan	4.999.870
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	4.999.870
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	30.694.970
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mempunyai Sarana HI	8.999.990
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5.000.000
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3.999.990
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang menindaklanjuti Pembinaan Ketenagakerjaan	21.694.980

2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5.197.420
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	4.000.000
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	10.497.880
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.999.680
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		96.999.600
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase kontribusi sektor industri dalam PDRB	60.000.000
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang diberdayakan	60.000.000
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	60.000.000
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase peningkatan jumlah pelaku industri (unit usaha)	12.000.000
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IUI yang diterbitkan	12.000.000
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota	7.000.000

						sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	5.000.000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Proporsi pelaku usaha industri yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	24.999.600
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Informasi Industri	24.999.600
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	10.000.000
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	14.999.600

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri tahun 2025. Penyusunan Renja tahun 2025 lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renja akan menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tahun 2025.

Perubahan berbagai kebijakan ketenagakerjaan dan perindustrian sangat sulit diprediksi sehingga pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun 2025 ini dapat saja berubah, namun secara prinsip seluruh yang tertuang dalam Renja ini merupakan hasil kajian terhadap seluruh kebutuhan program dan kegiatan. Perubahan yang terjadi tetap dalam upaya pencapaian sasaran utama bidang ketenagakerjaan dan perindustrian di Kabupaten Wonogiri sehingga diharapkan seluruh unsur di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tetap selalu menjadikan Renja ini sebagai pedoman utama dalam menjalankan program dan kegiatan tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Renja sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dan komitmen yang kuat serta koordinasi yang kuat dari semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Hasil kinerja Renja nantinya akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja di tahun berikutnya sehingga kinerja Perangkat Daerah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dapat terukur, bermanfaat dan berkesinambungan.

Di tahun 2025 dengan memperhatikan penilaian SAKIP, maka akan meningkatkan nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten

Wonogiri dengan memenuhi rekomendasi SAKIP yang ada pada Lembar Hasil Evaluasi (LHE).

Dokumen Renja 2025 yang telah tersusun ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menjalankan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah ada dan dianggarkan di tahun 2025 terutama dalam menjawab Sasaran “Menurunnya Pengangguran dan Masyarakat yang mandiri ekonominya” dengan menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Wonogiri dan meningkatkan Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT). Pada bab penutup ini Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses perumusannya melibatkan level paling bawah melalui aplikasi SIPD Kabupaten Wonogiri dan setelahnya juga dilakukan reviu Renja.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*) tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak Lanjut

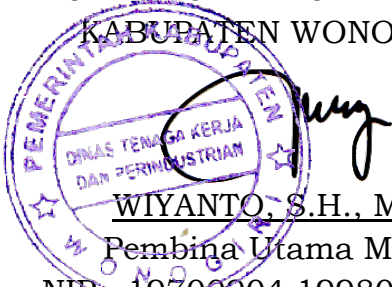
Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan

program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan anggaran Tahun Anggaran 2025.

Wonogiri, 30 Juli 2024
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN WONOGIRI,



WIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700904 199803 1 009